

**ANALISIS PERAN BRI UNIT KETANDAN
DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ENGGAR PRADIPTA WIDYARESTI

NIM. C2B008026

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Enggar Pradipta Widyaresti
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008026
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN BRI UNIT KETANDAN
DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) KEPADA USAHA MIKRO
DAN KECIL DI KECAMATAN NGAWEN
KABUPATEN KLATEN**
Dosen Pembimbing : Achma Hendra Setiawan, SE., M.Si

Semarang, Juni 2012
Dosen Pembimbing

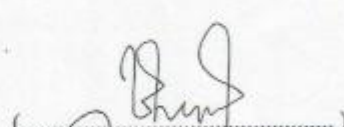
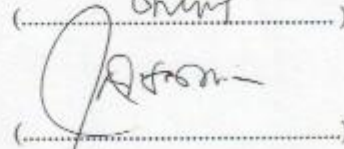
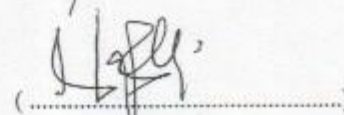
Achma Hendra Setiawan, SE.,M.Si
NIP. 196905101997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Enggar Pradipta Widyaresti
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008026
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP
Judul Skripsi : **Analisis Peran BRI Unit Ketandan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Kepada Pengusaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2 Juli 2012

Tim Penguji :

1. Achma Hendra Setiawan, SE., M.Si (.....)
2. DR.II. Hadi Sasana, SE., M.Si (.....)
3. Nenek Woyanti, SE., M.Si (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Enggar Pradipta Widya Resti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Peran BRI Unit Ketandan Dalam Pemberian Kredit Usaha rakyat (KUR) Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juni 2012

Yang membuat pernyataan

(Enggar Pradipta Widya Resti)

NIM: C2B008026

MOTTO

- *Cukuplah Allah yang menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung (Ali Imraan : 173). Dia adalah sebaik-baiknya Pelindung dan sebaik-baiknya Penolong (Al Anfaal : 40)*
- *Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan ? itulah orang yang menolak hak anak yatim, tidak member makan orang miskin, yang melalaikan terhadap Shalat mereka, orang yang Riya' dan mencegah untuk memberi bantuan (sedekah) (Surat Al Ma'uun)*
- *Ingatlah rumus 3M. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang kecil, dan mulailah sekarang juga. (Abdullah Gymnastiar)*
- *Dengan Ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, dan dengan agama kehidupan akan menjadi terarah dan bermakna. (HR, Mukti Ali)*
- *Jangan hiraukan orang-orang yang berbicara sesukanya tentang dirimu, hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata mereka (Mario Teguh)*

✚ Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Bapak yang selalu bekerja keras untuk menyekolahkanku sampai saat ini, serta memberi apa yang aku butuhkan dan membentuk kepribadianku hingga seperti sekarang.

Ibu tercinta yang senantiasa memberi curahan kasih sayang, yang tidak dapat terbayarkan dan tergantikan oleh apapun serta doa yang terus diberikan Siang Malam untuk Kesuksesan dan Kebahagiaanku.....

Adik-adikku yang selalu menjadikan satu alasanku untuk maju dan terus maju,,semoga aku menjadi teladan bagi mereka ...

ABSTRACT

Micro and small enterprises play an important role in economic development because of its labor absorption rate is relatively high, but with limited capital owned. In general, the problems faced by SMEs in District Ngawen Klaten is the issue of capital, where small micro entrepreneurs do not have enough capital to run the business.

The purpose of this study was to analyze the differences and the development of the MSE between the before and after obtaining the loan People's Business Credit (KUR) of BRI Unit Ketandan which includes venture capital, production, sales turnover and profits. MSE is the object of his research into customer KUR BRI Ketandan with sample size of 85. Type of data collected are the primary data and secondary data. Data analysis methods used in this research include test validity, test reliability and Wilcoxon sign rank test.

Based on a Wilcoxon sign rank test for variables obtained p-value of capital of 0.000 ($0.000 < 0.05$) which means there are different capital variables before and after obtaining a loan from BRI Unit Ketandan or an increase in venture capital an increase of 230%. For variables produksi obtained p-value of 0.000 ($0.000 < 0.05$) which means there are different production variables before and after obtaining a loan from BRI Unit Ketandan or an increase in production of an increase of 243%.

Based on a Wilcoxon sign rank test for variables of sales turnover obtained p-value of 0.000 ($0.000 < 0.05$) which means there is a sales turnover of different variables before and after obtaining a loan from BRI Unit Ketandan an increase of 202%. For the variable profit obtained p-value of 0.000 ($0.000 < 0.05$) which means there are different profit variables before and after obtaining a loan from BRI Unit Ketandan or an increase in profit of an increase 189%.

Keywords: Micro and small business, people business credit, working capital, Production, Sales turnover, Profit.

ABSTRAKSI

Usaha mikro dan kecil memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi namun dengan keterbatasan modal yang dimiliki. Pada umumnya masalah yang dihadapi oleh UMK di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten adalah masalah permodalan, dimana pengusaha mikro kecil tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk menjalankan usaha.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan dan perkembangan UMK antara sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI Unit Ketandan yang meliputi modal usaha, produksi, omzet penjualan dan keuntungan. Objek penelitiannya yaitu UMK yang menjadi nasabah KUR BRI Unit Ketandan dengan sampel sebanyak 85. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas dan Uji pangkat tanda *Wilcoxon*.

Berdasarkan perhitungan uji pangkat tanda *wilcoxon* untuk variabel modal didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman dari BRI Unit Ketandan. Setelah mendapatkan pinjaman KUR dari BRI Unit Ketandan, modal mengalami peningkatan sebesar 230 %. Untuk variabel produksi didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel produksi sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman dari BRI Unit Ketandan meningkat sebesar 243 %.

Berdasarkan perhitungan uji pangkat tanda *wilcoxon* untuk variabel omzet penjualan didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman dari BRI Unit Ketandan atau terjadi peningkatan omzet penjualan meningkat sebesar 202 %. Untuk variabel keuntungan didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel keuntungan sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman dari BRI Unit Ketandan atau terjadi peningkatan keuntungan sebesar 189%.

Kata Kunci : Usaha Mikro dan kecil, Pinjaman KUR, Modal Usaha, Produksi, Omzet Penjualan, Keuntungan,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas semua berkah dan karunia-Nya selama ini yang selalu melindungi dan meridhoiku.
2. Bapak Dr. H. M. Nasir, M.Si, Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Ibu Johanna Maria Kodoatie, SE., M.Ec.,Ph.D selaku ketua jurusan IESP Reg 1.
4. Bapak Achma Hendra Setiawan,SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan segala kemudahan, nasehat dan saran yang tulus, dan pengarahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. DR.H.Hadi Sasana.,S.E.,M.Si selaku penguji skripsi
6. Ibu Neni Woyanti, S.E.,M.Si selaku dosen wali IESP angkatan 2008 dan selaku penguji.
7. Bapak/ibu dosen Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak bekal ilmu kepada penulis.
8. Staff dan karyawan BRI Cabang Klaten yang telah banyak membantu dalam pencarian data-data yang dibutuhkan penulis.
9. Kepala unit beserta karyawan BRI Unit Ketandan yang telah banyak membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, dukungan dan segala pengorbananya selama ini yang sabar dan tidak pernah putus mengiringi setiap langkah kehidupanku dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dorongan moral dan spiritual serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua adikku Gilang Aditya Pranadi dan Mahatma Widhi Nararya yang menjadikanku alasan untuk dapat maju dan terus maju supaya menjadi contoh bagi mereka kelak.
12. Alfian Prihanadi yang memberiku support, kesabaran dan perhatiannya yang menjadikanku satu alasan untuk dapat lulus secepat mungkin.
13. Buat mbak Rifda yang sudah mau mengajari saya cara mengolah data..tanpamu skrispsi saya tidak mungkin bisa jadi secepat ini mbak...
14. Buat para sahabatku Fanita Osha Tazkia, Katrine Retno, Lintan Gupita, Rifqi Sabatini, Fitria Majid, Ardana Indra, Noval Akhmad, S Iglesias. Anang Faisal, Rosetyadi, Anandriyo Suryo, Dicky Wahyudi bersyukur rasanya bisa kenal kalian semua dan atas kebersamaannya selama ini.
15. Buat keluarga besar IESP CERIA 2008...kalian semua sudah melebihi saudara,,semoga kita tetap menjadi keluarga sampai kapanpun.

Semarang, Juni 2012

Penulis

Enggar Pradipta Widyaresti
NIM : C2B008026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	14
2.1.1.1 Pengertian Usaha Mikro	14
2.1.1.2 Peranan Usaha Mikro dan Kecil	19
2.1.1.3 Permasalahan dalam Usaha Mikro dan Kecil	22
2.1.1.4 Keunggulan Usaha Mikro dan Kecil	27
2.1.1.5 Peran Pemerintah Dalam Memajukan Usaha Mikro dan Kecil	28
2.1.2 Modal	32
2.1.3 Fungsi Produksi	33
2.1.4 Omzet Penjualan	36
2.1.5 Keuntungan.....	38
2.1.6 Kredit Usaha Rakyat BRI	40
2.1.6.1 Pengertian dan Ketentuan Kredit Usaha Rakyat	40

2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Pemikiran	49
2.4 Hipotesis	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Variabel Operasional dan Definisi Operasional Variabel	51
3.2 Populasi Penelitian dan Sampel	52
3.3 Jenis dan Sumber Data	54
3.4 Metode Pengumpulan Data	55
3.5 Metode Analisis.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	59
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Klaten	59
4.1.2 Kondisi Geografis Kecamatan Ngawen	60
4.2 Gambaran Umum Kantor Cabang BRI Klaten	60
4.2.1 Gambaran Umum Kantor BRI Unit Ketandan	63
4.2.2 Mekanisme Penyaluran KUR BRI Unit Ketandan	67
4.3 Analisis Data	71
4.3.1 Profil Responden	72
4.3.2 Profil Usaha Mikro dan Kecil Kecamatan Ngawen	76
4.3.2.1 Modal Usaha Mikro dan Kecil.....	76
4.3.2.2 Produksi Usaha Mikro dan Kecil	77
4.3.2.3 Omzet Penjualan Usaha Mikro dan Kecil	78
4.3.2.4 Keuntungan Penjualan Usaha Mikro dan Kecil.....	79
4.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	80
4.4.1 Uji Validitas	80
4.4.1.1 Instrumen Modal	81
4.4.1.2 Instrumen Produksi	81
4.4.1.3 Instrumen Omzet Penjualan.....	82
4.4.1.4 Instrumen Keuntungan	82
4.4.2 Uji Reliabilitas	83
4.5 Interpretasi Hasil	84
4.5.1 Variabel Modal.....	85
4.5.2 Variabel Produksi	86
4.5.3 Variabel Omzet penjualan.....	87
4.5.4 Variabel Keuntungan	88
BAB V PENUTUP	90

5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Banyak Perusahaan/ Unit di Jawa Tengah	4
Tabel 1.2 Jumlah Pengusaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Klaten.....	6
Tabel 1.3 Realisasi KUR BRI Unit di Klaten Periode 3 Tahun (2009, 2010, 2011).....	7
Tabel 1.4 Direktori Sentra UMK tahun 2010.....	10
Tabel 2.1 Ragam Pengertian Umum Usaha Mikro.....	18
Tabel 2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan UMK	31
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	46
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	72
Tabel 4.2 Pengujian Validitas Instrumen Modal	81
Tabel 4.3 Pengujian Validitas Instrumen Produksi	81
Tabel 4.4 Pengujian Validitas Instrumen Omzet Penjualan.....	82
Tabel 4.5 Pengujian Validitas Instrumen Keuntungan.....	82
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	83
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Modal Sebelum dan Sesudah KUR	85
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Produksi Sebelum dan Sesudah KUR	86
Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah KUR	87
Tabel 4.10 Hasil Hipotesis Perbedaan Keuntungan Sebelum dan Sesudah KUR.....	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Banyaknya Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5
Gambar 1.2 Jumlah Nasabah di Beberapa Unit BRI	7
Gambar 2.1 Kurva Produksi, Produksi Marginal dan Rata-rata	34
Gambar 2.2 Kurva Keuntungan Maksimum	38
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	48
Gambar 4.2 Peta Administratif Kecamatan Ngawen.....	59
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BRI Unit Ketandan	64
Gambar 4.4 Presentase Alamat Responden	72
Gambar 4.5 Presentase Jenis Kelamin responden	73
Gambar 4.6 Presentase Status Pendidikan Responden	74
Gambar 4.7 Presentase Lama Usaha Responden	75
Gambar 4.8 Rata-rata Modal Sebelum dan Sesudah KUR	76
Gambar 4.9 Rata-rata Produksi Sebelum dan Sesudah KUR	77
Gambar 4.10 Rata-rata Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah KUR.....	78
Gambar 4.11 Rata-rata Keuntungan Sebelum dan Sesudah KUR	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro dan kecil memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMK tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMK dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Mengingat UMK umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMK diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki daya saing yang kuat jika UMK telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro dan kecil perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Berdasarkan data

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menunjukkan bahwa UMK masih menjadi pelaku unit usaha atau 99.99% dari pelaku bisnis di Indonesia.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. UMK diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. UMK di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu (Andang Setyabudi, 2007) :

1. Sebagian UMK menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama.
2. Mayoritas UMK lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha.
3. Pada umumnya UMK melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja.
4. Terbentuknya UMK baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. UMK di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian.

Menurut Ni Putu (2007), penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UMK. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak

terdapat beberapa fungsi utama UMK dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yaitu :

- (1) Sektor UMK sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal.
- (2) Sektor UMK mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
- (3) Sektor UMK sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.

Berdasarkan data Kementriaan Negara Koperasi dan UMK tahun 2008 menyatakan bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih menjadi pelaku usaha yang paling banyak yaitu mencapai 51,26 juta unit usaha atau 99,99% dari pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Jumlah UMK ini berkembang sebesar 2,88% dari tahun sebelumnya tahun 2007 yaitu sebesar 49,82 juta unit usaha. Dalam penyerapan tenaga kerja UMK mampu menyerap 97,04% tenaga kerja produktif yang tersedia, dari 97,04% tersebut usaha mikro menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 89,30% sedangkan usaha kecil dan menengah masing-masing mampu menyerap tenaga kerja sebesar 4,26% dan 3,48%. Sumbangan UMK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif kecil dibanding dengan jumlah UMK yang sedemikian besar yaitu sebesar Rp 2.609,36 triliun atau 55,56% dari total PDB nasional menurut harga berlaku dan sisanya 44,44% berasal dari Usaha Besar (UB).

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah, Usaha Mikro dan Kecil mempunyai jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan

unit usaha besar. Kenaikan jumlah UMK mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2005-2009. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 :

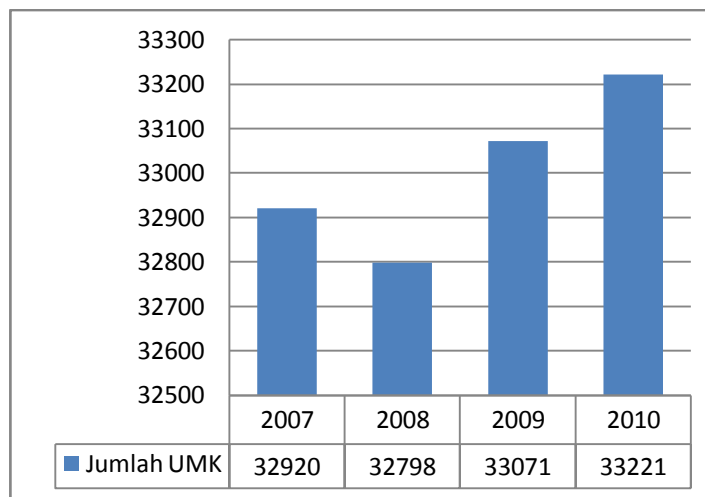
Tabel 1.1
Banyak Perusahaan / Unit Usaha di Jawa Tengah
Tahun 2005-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Industri	319.599	319.645	319.660	319.905	319.948
Besar	469	470	472	486	496
Mikro Kecil	319.130	319.175	319.188	319.419	319.452

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah

Kabupaten Klaten merupakan salah satu bagian dari 35 Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 26 Kecamatan dan 401 desa dengan luas wilayah 655,56 Km². Menurut BPS Kabupaten Klaten jumlah penduduk pada tahun 2009 mencapai 1.303.910 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 537.939 dan jumlah penduduk perempuan sebesar 655.971. Kabupaten Klaten memiliki tanah yang subur yang potensi pertaniannya dikatakan cukup besar seiring pertumbuhan industri Mikro Kecil dan Menengah yang mencapai hampir ±34.000 unit usaha industri.. Berdasarkan data dari BPS tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat 33.221 perusahaan industri/ unit di Kabupaten Klaten. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha). Data banyaknya unit usaha (unit) menurut jenis UMK empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2007 sampai dengan 2010 di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Banyaknya Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Klaten Tahun 2007-2010



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Klaten

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa dari jumlah unit UMKM rata-rata dari tahun 2007-2010 yaitu sebesar 33.002 , angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) UMK. UMK sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan kesempatan membuka usaha di Kabupaten Klaten. Data banyaknya unit usaha (unit) dan tenaga kerja (orang) menurut jenis UMK tahun 2009 di Kabupaten Klaten walaupun pada tahun 2008 mengalami penurunan jumlah unit usaha. Dengan jumlah UMK yang relatif mengalami peningkatan, hal ini membuktikan bahwa peranan UMK sangat penting dalam perekonomian di Kabupaten Klaten.

Kecamatan Ngawen merupakan salah satu kecamatan di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 13 desa / kelurahan. Luas wilayah 16,97 km² dengan jumlah penduduk 44,560 pada tahun 2009. Kecamatan Ngawen dapat dikatakan memiliki potensi dalam Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengusaha mikro dan kecil pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Jumlah Pengusaha Mikro dan Kecil Beberapa Kecamatan
Di Kabupaten Klaten
Tahun 2007 – 2010

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010
1	Karanganom	272	288	297	317
2	Jatinom	217	225	248	261
3	Ngawen	293	315	323	329
4	Karangnongko	107	98	119	131
5	Kemalang	97	111	120	134
6	Jogonalan	272	291	315	326
7	Gantiwarno	92	120	144	158
8	Klaten Selatan	89	108	129	143
9	Bayat	276	317	328	339
10	Wonosari	142	159	151	186

Sumber : Dinas perindustrian dan Perdagangan Kab. Klaten .

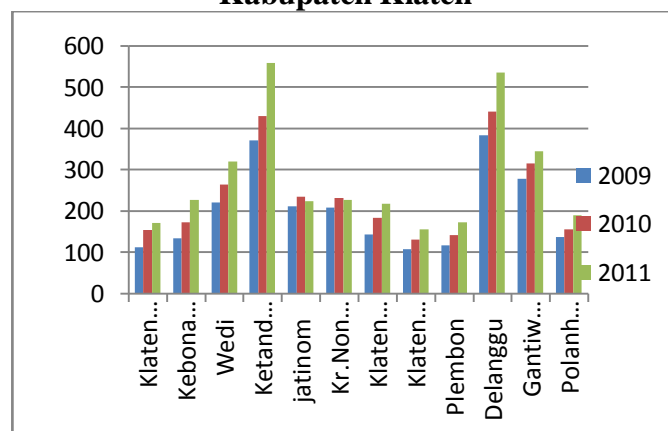
Meskipun UMK dikabupaten Klaten khususnya di kecamatan Ngawen jumlah pengusaha dapat dikatakan cukup banyak, namun banyak kendala yang dialami dalam pengembangan usaha terutama faktor modal. Menurut Mubyarto (1994) modal merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya suatu produksi. Dalam arti kelangkaannya bahkan peranan faktor modal lebih menonjol lagi.

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat

perseorangan atau badan usaha. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal usaha bagi UMK dan koperasi yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ini merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Karena itulah Bank BRI Unit Ketandan melalui Kredit Usaha Rakyat ini bermaksud memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, yang sudah *feasible* tetapi belum *bankable* mendapatkan modal usaha. Pinjaman modal usaha ini merupakan alternatif yang cocok bagi UMK.

BRI Unit Ketandan merupakan salah satu unit kerja di BRI Cabang Klaten yang memiliki debitur yang dapat dikatakan cukup banyak dalam penyaluran Kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2
Jumlah Nasabah Beberapa Unit BRI
Kabupaten Klaten



Sumber : BRI Cabang Kab. Klaten

Banyak atau sedikitnya Nasabah KUR pada setiap unit BRI di Kabupaten Klaten, Berpengaruh langsung terhadap jumlah realisasinya. Pada tabel 1.3 berikut ini dapat dilihat jumlah realisasi KUR periode 3 tahun.

Tabel 1.3
Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Periode 3 Tahun (2009, 2010, 2011)

Komersial Kredit Usaha Rakyat (KUR)				
		2009	2010	2011
No	Unit	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Klaten Kota	475.854.452	625.267.064	904.807.716
2.	Kebonarum	620.948.564	780.105.964	1.034.791.720
3.	Wedi	1.188.479.240	1.035.527.460	1.743.310.812
4.	Ketandan	1.443.399.560	1.820.329.872	2.518.853.300
5.	Jatinom	809.576.644	1.403.030.188	1.886.790.908
6.	Karangnongko	986.418.096	871.117.268	1.213.443.088
7.	Klaten Pasar	617.968.177	821.235.800	1.599.451.504
8.	Klaten Utara	504.398.264	716.992.408	937.420.104
9.	Klaten Selatan	893.783.788	703.334.508	1.586.599.676
10.	Plembon	501.312.870	635.626.808	753.563.348
11.	Delanggu	1.467.576.846	1.604.312.568	2.479.119.668
12.	Gantiwarno	826.031.635	974.852.157	1.855.409.060
13.	Karangdowo	705.945.764	870.096.484	1.643.383.404
14.	Polanharjo	645.379.732	922.334.772	1.379.035.672
Jumlah		11.941.073.623	13.850.161.961	21.785.709.774
Rata-rata		852.933.830	1.850.297.282	1.556.122.127

Sumber : Arsip BRI berbagai Unit Klaten 2011.

Dari tabel 1.3 dapat dilihat realisasi KUR BRI pada tahun 2009 jumlah realisasi KUR yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 11.941.073.623,00 sehingga rata-rata yang didapat adalah sebesar Rp852.933.830,00. Unit yang paling banyak mengeluarkan KUR pada tahun 2009 adalah BRI Unit Delanggu dengan nominal KUR 1.467.576.846,00. BRI Unit Ketandan dengan nominal realisasi sebesar Rp 1.443.399.360,00 berada di urutan ke dua. Sedangkan unit yang paling kecil mengeluarkan realisasi KUR adalah Unit Klaten Kota dengan realisasi sebesar Rp 475.854.452,00.

Pada tahun 2010 jumlah realisasi KUR mengalami kenaikan 13,7 % sehingga rata-rata yang mengalami peningkatan sebesar Rp 989.279.282,00. Pada tahun 2010 unit yang mengeluarkan KUR terbanyak adalah Unit Ketandan dengan realisasi KUR sebesar Rp 1.820.329.872,00 dengan kenaikan sebesar 34,7 %. Sedangkan pada tahun 2010 Unit yang mengeluarkan KUR terendah adalah Unit Klaten Kota yaitu sebesar Rp 625.267.064,00.

Pada tahun 2011 jumlah realisasi KUR meningkat sebesar 36,4 % dari tahun sebelumnya . Maka rata-rata yang diperoleh pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.556.122.127,00. Unit yang paling banyak mengeluarkan KUR adalah Unit Ketandan yaitu sebesar Rp 2.518.853.094,00 yang mengalami kenaikan sebesar 27,7 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan unit yang paling sedikit mengeluarkan KUR adalah Unit Plembon dengan realisasi KUR sebesar Rp 753.563.348,00. KUR diberikan oleh BRI Unit Ketandan kepada para pengusaha mikro dan kecil di

Kecamatan Ngawen yang mengalami kekurangan modal dalam pengembangan usahanya. Modal merupakan aspek yang paling berpengaruh dalam mendirikan suatu usaha. Jika modal yang digunakan tidak sebanding dengan jumlah produksi yang dilakukan, maka produsen harus mengurangi jumlah produksinya sesuai dengan modal yang dipunya. Dengan Keterbatasan modal yang dialami oleh sebagian besar pengusaha mikro dan kecil Kecamatan Ngawen dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Direktori Sentra Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2010
Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten

No	Jenis Usaha	Unit Usaha	Modal (Rp 000)	Produksi	Satuan	Omzet (Rp 000)
1.	Genteng	35	44.000	660.000	buah	298.000
2.	Batu bata	29	96.000	50.400	buah	321.800
3.	Mebel	23	189.000	2.710	buah	731.000
4.	Konveksi	44	322.000	552.766	potong	953.120
5.	Kapas riasan	21	192.000	3.536	kw	597.920
6.	Soon	24	86.000	1.040	kw	336.720
7.	Mie basah	19	84.000	1.520	kw	534.819
8.	Tahu/tempe	12	72.000	2.240	kg	152.291
9.	Ikan tawar	17	47.000	9.600	kg	254.723
10.	Karak beras	22	14.000	2.256	kg	62.613
11.	Tepung beras	11	52.000	1.980	kg	102.121
12.	Alat tani/dapur	19	29.020	2.722	buah	79.101
13.	Aneka Kerupuk	18	19.000	1.728	kg	59.104
14.	Telur asin	15	31.500	54.000	butir	73.921
15.	Sulak Bulu	15	25.500	1.596	buah	76.126

Sumber : Disperindag-Kop kab. Klaten

1.2 Rumusan Masalah

Meskipun usaha mikro dan kecil di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten memiliki potensi yang besar, tetapi produksi belum dapat dilakukan dengan

maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut mengenai tingkat produksi yang dihasilkan oleh pengusaha mikro dan kecil Kecamatan Ngawen:

Potensi pada usaha mikro dan kecil di kecamatan Ngawen walaupun dilihat dari nilai produksi pada tabel diatas menunjukkan jumlah yang tidak sedikit, namun produksi yang dilakukan belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor utama yaitu modal. Jika modal yang digunakan tidak sebanding dengan jumlah produksi yang dilakukan, maka produsen harus mengurangi jumlah produksinya sesuai dengan modal yang dipunya. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan penelitian KUR :”apakah pemberian pinjaman KUR dari BRI Unit Ketandan dapat benar-benar membantu dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil dilihat dari aspek perbedaan modal, produksi, omzet penjualan, dan keuntungan antara sebelum dan sesudah memperoleh KUR?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan kinerja usaha mikro antara sebelum dan setelah memperoleh bantuan KUR dari BRI Unit Ketandan. Hal ini diteliti dengan menganalisis perbedaan variable modal, produksi, omzet penjualan, dan keuntungan antara sebelum dan sesudah memperoleh KUR dari Bank Rakyat Indonesia unit Ketandan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Sebagai bahan referensi bagi penelitian pada bidang yang sama.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang yang sama.
3. Referensi dalam pengambilan kebijakan pemberian pinjaman modal usaha bagi badan yang bersangkutan atau instansi lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang dapat disajikan sebagai literatur, yang sesuai dengan topik dari skripsi yang dapat membantu penulisan. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran atas permasalahan yang diteliti serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi hasil dan analisis, dimana metode yang digunakan adalah uji statistik pangkat tanda *Wilcoxon*, yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas

dan reliabilitas untuk kuesioner penelitian. Metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas penelitian. Di dalam Uji *Wilcoxon* dapat diketahui dan dianalisis perbedaan variabel antara pada awal periode dan akhir periode. Adapun variabel yang akan diuji perbedaan kinerjanya adalah modal, produksi, omzet penjualan, dan keuntungan.

BAB IV HASIL dan ANALISIS

Menguraikan hasil dan analisis yang terdiri dari deskripsi objek penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi saran-saran yang mendukung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

2.1.1.1 Pengertian Usaha Mikro dan Kecil

Hampir semua orang pernah mendengar istilah Usaha Mikro dan Kecil (UMK), namun mungkin hanya sedikit orang yang paham maksud kata tersebut dengan satu kesamaan pandangan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan instansi-instansi pemerintah sendiri memiliki perbedaan cara dalam pengklasifikasiannya.

Ada beberapa definisi yang menerangkan tentang arti Usaha Mikro. Menurut Departemen Perindustrian UMK didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total asset tidak lebih dari Rp 600 juta (diluar area perumahan dan perkebunan). Definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.

Lain halnya dengan pengertian UMK sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha mikro :

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah
3. Belum melakukan administrasi keuangan dengan keuangan usaha dan sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadahi
4. Tingkat pendidikan yang dimiliki relatif rendah
5. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro

- Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya
- Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat
- Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dan lainnya
- Peternakan ayam, itik dan perikanan

- Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Usaha Kecil biasanya ditandai dengan :

1. Jenis barang atau komoditinya tidak gampang berubah
2. Mempunyai kekayaan maksimal 200 Juta dan dapat menerima kredit maksimal 500 Juta
3. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap
4. Sudah memiliki pembukuan walaupun masih sederhana artinya pencatatan administrasi keuangan perusahaan sudah mulai dipisah.
5. Memiliki legalitas usaha atau perijinan lainnya pendidikan yakni rata tingkat SMU,
6. Sudah mulai mengenal perbankan.

Menurut Neddy Rafinaldi, 2007 dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

- Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang
- Tidak sensitif terhadap suku bunga
- Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter

- Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugus dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

Menurut Bank Indonesia, definisi Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki keluarga, sumberdaya lokal, dan teknologi yang sederhana. Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakannya yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Usaha mikro menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja. Ragam pengertian umum usaha mikro dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Ragam Pengertian Umum Usaha Mikro

Lembaga	Pengertian Umum
UU. No. 20/ 2008 Tentang UMK	Aset ≤Rp 50.0000.0000 Omzet ≤Rp 300.000.000 per tahun
BPS	Pekerja < 5 orang
Depnaker	Pekerja < 5 orang
Bank Indonesia	Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat miskin, bersifat usaha keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana, dan mudah keluar masuk industri. Pekerja < 5 orang
Bank Dunia	Pekerja < 10 orang Aset < \$ 3 juta Omzet < \$ 3 juta per tahun
Kementrian Negara Koperasi dan UMK	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.
Keputusan Menteri Keuangan No. 40/ KMK. 06/ 2003	Omzet ≤Rp 100.000.000 per tahun Pinjaman ke bank ≤Rp 50.000.000

Sumber: Dari berbagai sumber

2.1.1.2 Peranan Usaha Mikro dan Kecil

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar didalam negeri, merupakan ancaman bagi UMK dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar dampak globalisasi. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UMK saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UMK dapat tercapai dimasa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Nunik Afiah (2009) Usaha mikro dan kecil menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat menengah kebawah dalam meningkatkan kesejahteraannya. Eksistensi dan peran uasah mikro dan kecil yang pada tahun 2008 mencapai 49,84 juta unit usaha, dan merupakan 99,99% dari pelaku usaha nasional, dalam tata perekonomian nasional sudah tidak diragukan lagi, dengan melihat kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, nilai ekspor nasional, dan investasi nasional.

Teori Klasik memiliki pandangan yang berbeda dengan teori modern mengenai peran usaha mikro. Menurut pandangan teori klasik usaha mikro berperan dalam proses industrialisasi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa

bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pembangunan ekonomi pedesaan. Peran usaha mikro yang paling populer dan sangat penting adalah kemampuannya menyediakan kesempatan kerja (Giaoutzi, et al dalam Sulistyastuti, 2004).

UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.

Usaha mikro selain memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, juga berperan sebagai mediasi proses industrialisasi suatu Negara. Kontribusi industri kecil sangat penting dalam proses industrialisasi pada tahap awal yaitu sebesar 50-75%. Menurut Perkembangan usaha mikro yang diawali dari IKR (Industri Kecil Rumah Tangga) bergerak dalam bidang industri garmen, sepatu, kerajinan tangan, maupun makanan yang bahan bakunya dari sektor pertanian.

Tahap kedua ditandai dengan kemunculan *workshop-workshop* yang sederhana yang menggantikan rumah sebagai lokasi. Pada tahap kedua ini keberadaannya telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat. Demikian pula mengenai lokasi usaha, dimana pada tahap awal berada di pedesaan, namun pada tahap kedua ini, mulai menyebar ke perkotaan baik *urban* maupun *sub-urban*.

Tahap ketiga, industri didominasi oleh industri berskala menengah. Industri skala menengah sudah memiliki sistem produksi dan manajemen yang lebih efisien. Selain itu, juga sudah mampu melakukan koordinasi yang lebih baik sehingga

memiliki akses yang lebih luas, mereka juga telah mengembangkan investasi dan infrastruktur. Selama 3 periode tersebut, para pemilik usaha telah mengalami proses pembelajaran (*learning process*) baik dalam sistem produksi maupun manajemen.

Teori modern memandang bahwa pentingnya eksistensi serta pengembangan usaha mikro berkaitan dengan spesialisasi yang fleksibel dalam memproduksi dan ekspor (Piore dan Sabel dikutip Sulistyastuti, 2004). Usaha mikro sangat penting dalam proses produksi dengan kemampuannya melakukan spesialisasi, maka terjadi keterkaitan (*linkage*) antara usaha mikro dengan usaha besar. Hal ini sangat penting bagi perkembangan perekonomian secara keseluruhan. Keterkaitan (*linkage*) adalah suatu pola hubungan antara perusahaan dengan saling memberikan keuntungan, dalam hal ini posisi usaha mikro sebagai penyedia *spare part* dan berbagai macam input bagi usaha berskala besar melalui pola sub kontrak. Keterkaitan antara usaha mikro dengan usaha besar mendukung teori *Flexible Specialization* yang berkembang tahun 1980-an. Teori ini menentang teori yang dikembangkan Anderson yang bernada pesimis dengan memprediksi bahwa usaha mikro makin menghilang ketika pembangunan ekonomi makin maju. Namun menurut teori *Flexible Specialization* justru beranggapan bahwa usaha mikro penting dalam proses pembangunan ekonomi yang semakin maju (Tambunan, 2002). Selain keunggulan dalam spesialisasi produksi, teori modern juga beranggapan bahwa usaha mikro sebagai salah satu penggerak motor ekspor.

Untuk pasar barang, usaha mikro melakukan transaksi dengan seluruh pelaku ekonomi, baik sesama usaha mikro, UKM, usaha besar, bahkan pelaku usaha internasional. Usaha mikro ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap ekspor negara. Usaha mikro juga berperan sebagai distributor sekaligus pangsa bagi berbagai produk yang dihasilkan oleh usaha besar. Bahkan bagi beberapa produsen besar produk konsumsi, seperti mie instan dan kosmetik, pasar usaha mikro sebagian besar merupakan pangsa konsumsinya, baik sebagai konsumen langsung maupun perantara (Krisnamurthi dalam Yustika).

2.1.1.3 Permasalahan Dalam Usaha Mikro dan Kecil

Meskipun peranan UMK dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar seperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Padahal UMK masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk mengatasi keterbatasan akses ke kredit bank/sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Masih banyaknya permasalahan

yang dihadapi oleh UMK membuat kemampuan UMK berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal.

Dari hasil survey tentang profil Usaha mikro dan kecil yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terdapat permasalahan maupun kendala usaha mikro yang dilihat dari perspektif maupun dari perbankan. Dari sisi usaha mikro beberapa variabel penting yang masih rendah kinerjanya antara lain:

- kemudahan usaha mikro dan kecil dalam memperoleh ijin
- kemampuan usaha mikro dan kecil untuk mengelola keuangan
- ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit dan
- tenaga kerja yang trampil.

Sedangkan dari sisi perbankan, variabel-variabel Usaha mikro dan kecil yang berkinerja rendah di antaranya adalah (Ni Putu, 2007):

- kemampuan pengelolaan keuangan
- kapabilitas pemasaran
- ketrampilan tenaga kerja
- kontrol kualitas dalam produksi.

Pada umumnya ada tiga institusi yang berperan dalam pembinaan Usaha mikro dan kecil, yaitu (Ni Putu, 2007):

1. Lembaga teknis yang bertugas mengembangkan produk, utilitas, kualitas SDM dan optimalisasi (lebih pada *business side*).

2. Lembaga keuangan yang bertugas menyediakan dana secara profesional (*microfinance*). Keprofesionalan ini sering kali dikaitkan dengan pemberiandana kepada usaha mikro dan kecil yang *bankable*, namun fakta di lapangan menyebutkan bahwa hampir 99% usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak memenuhi syarat *bankable* tersebut, sehingga analisis kredit dapat dilakukan dengan metode kualitatif.
3. Lembaga pemasaran yang bertugas membantu memberi asistensi kepada usaha mikro dan kecil dalam akses pasar dan pemasaran (*market and marketing*). Sebenarnya di Indonesia, sebelum isu usaha mikro dan kecil merebak, telah dilakukan berbagai macam strategi dalam usaha mengembangkan usaha mikro dan kecil ini yang sebagian besar fokus pada pemberdayaan tenaga kerja melalui *output expansion* dan *innovation adoption*, yang berarti adanya peran lembaga teknis yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga lainnya.

Secara internal kendala usaha mikro adalah modal. Rata-rata kepemilikan modal usaha mikro dan kecil dari tahun 2008-2009 pada indeks harga tetap relatif rendah yaitu Rp 1.231.647,00 untuk usaha mikro dan Rp 16.021.348,00 untuk usaha kecil. Demikian juga pertumbuhan modal mereka tidak banyak yang berubah, walaupun ada yang berubah hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan karena adanya inflasi. Hal ini sangat wajar karena para pengusaha mikro belum tentu bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Selain itu kendala lain yang dialami oleh para pengusaha usaha mikro dan kecil adalah teknologi akses pasar, keterbatasan manajemen dan SDM serta informasi yang terbatas. Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung usaha mikro, seperti praktek monopoli dan proteksi terhadap beberapa industri besar (Djoko Retnadi, 2008).

Perkreditan dan permodalan bagi pengembangan UMK sering menjadi kendala, karena UMK sangat terbatas kemampuannya untuk mengakses terhadap lembaga perkreditan atau perbankan. Menurut Bank Indonesia, realitas menunjukkan bahwa UMK pada umumnya mengalami masalah dalam memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan kredit yang biasanya diukur dengan 5C, yaitu : *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Dari persyaratan 5C tersebut ada 2C yang sulit dipenuhi yaitu *capital* dan *collateral*. *Capital* berkaitan dengan persyaratan untuk memenuhi *capital adequacy ratio* (CAR) bagi para peminjam. Kesulitan ini terutama sering dihadapi oleh para pemodal kecil. Sedangkan *collateral* berkaitan dengan penyediaan jaminan atau agunan tambahan bagi peminjam.

Selain permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, secara umum UMK sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah finansial di antaranya adalah (Sri Adingingsih):

1. Kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMK.

2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMK.
3. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
4. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
6. Banyak UMK yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) di antaranya adalah (Sri Adiningsih) :

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMK mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMK untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.

4. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi

Di samping dua permasalahan utama di atas, UMK juga menghadapi permasalahan *linkage* dengan perusahaan serta ekspor. Permasalahan yang terkait dengan *linkage* antar perusahaan di antaranya sebagai berikut :

1. Industri pendukung yang lemah.
2. UMK yang memanfaatkan/menggunakan sistem *duster* dalam bisnis belum banyak.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan ekspor di antaranya sebagai berikut:

1. kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan.
2. Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor.
3. Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor.
4. Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.

Beberapa hal yang ditengarai menjadi faktor penyebab permasalahan-permasalahan di atas adalah: pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UMK, termasuk masalah perpajakan yang belum memadai, masih terjadinya ketidak sesuaian (*mismatch*) antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan UMK,serta kurangnya *linkage* antar UMK sendiri atau antara UMK dengan industri yang lebih besar. Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius serta terkait erat dengan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengembangkan UMK.

2.1.1.4 Keunggulan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Menurut Noer Soetrisno, 2007 perkembangan usaha Mikro dan Kecil di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan para pengusaha UMK mempunyai ciri khas dalam bidang produksinya sehingga memiliki berbagai macam keunggulan tersendiri . Menurut Neddy Refilandy, 2007 keunggulan yang dimiliki oleh UMK adalah sebagai berikut :

1. Secara kuantitatif dan kualitatif pertumbuhan UMK telah mencapai kemapanan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari statistik setiap tahunnya yang selalu mengalami kenaikan.
2. Pasar UMK masih sangat terbuka baik lokal maupun ekspor, tinggal bagaimana diciptakan pasar baru yang memungkinkan bagi UMK. Hal ini mengingat beraneka ragamnya produk UMK serta dukungan bahan baku sebagai *comparative advantage* yang tidak dimiliki oleh negara lain.
3. UMK harus didorong untuk senantiasa memahami nilai dan Hak Intelektual (HAKI dan Paten Produk). Hal ini penting karena dengan memahami nilai dan HAKI maka akan muncul produk khas daerah yang sangat unggul dan spesifik.
4. UMK diharapkan mampu meningkatkan kapasitasnya secara optimal dan profesional, dengan cara tetap beraliansi dengan berbagai pihak termasuk dengan para pengusaha besar.

2.1.1.5 Peran Pemerintah dalam Memajukan Usaha Mikro dan Kecil

Peran pemerintah dalam pengembangan UMK yaitu dengan berbagai perangkat kebijakan pemerintah pusat yang dapat dijadikan sebagai fasilitas UMK. Sebagai contoh, pemerintah kini telah memiliki Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai landasan berpijak bagi proses fasilitasi yang berkesinambungan. Ketentuan dalam undang-undang ini merupakan kemajuan dari produk perundangan sebelumnya, yaitu Undang-undang No.9 tahun 1995 yang terbatas hanya mengatur tentang usaha kecil. Namun yang masih diperlukan selanjutnya adalah agar semangat UU No.20/2008 untuk memfasilitasi pengembangan koperasi dan UMK dapat diteruskan dengan kebijakan-kebijakan yang dapat terbukti secara nyata.

Perlu diperhatikan ialah bahwa fasilitasi UMK hendaknya dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar yang sama, seperti yang tercantum dalam pasal (4) undang-undang ini, yaitu (Wahyudi Kumorotomo, 2008):

- Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
- Peningkatan daya-saing usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pada RPJM Nasional tahun 2004-2009 prinsip-prinsip pengembangan usaha mikro telah dikembangkan dengan arah sebagai berikut:

- A. Perluasan basis usaha dan penumbuhan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Strategi pokok yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah:
 - 1) meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi teknologi,
 - 2) pendekatan klaster disektor agribisnis dan agroindustri yang disertai kemudahan dalam pengelolaan usaha,
 - 3) mengembangkan peran koperasi dan UMK dalam proses industrialisasi, dan
 - 4) mengintegrasikan pengembangan usaha di tingkat regional.
- B. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMK, yang dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) perluasan akses kepada sumber permodalan, terutama perbankan,
 - 2) memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan, dan
 - 3) memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial.
- C. Pengembangan koperasi dan UMK untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya-

saing. Khusus bagi usaha skala mikro, pengembangan diarahkan untuk peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.

- D. Pengembangan koperasi dan UMK sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik. Strategi ini sangat penting agar masyarakat banyak tidak tergantung kepada produk-produk impor yang melemahkan ketahanan ekonomi rakyat secara keseluruhan.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2008) kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk membantu usaha mikro dan kecil secara sistematis dengan komitmen yang jelas kepada ekonomi rakyat, membangun berbagai bentuk pola kerjasama bisnis yang sinergis, serta berbagai kebijakan yang jelas dan terukur untuk menunjang setiap tahapan dalam daur bisnis, mulai dari penyusunan rencana bisnis, pengembangan produk, pembiayaan, promosi produk, hingga pengembangan kerjasama dalam bentuk riset terapan. Kebijakan yang dirumuskan tentunya tidak hanya mengandalkan rumusan-rumusan makro dengan memperbaiki iklim usaha, tetapi juga harus mengutamakan pendekatan mikro dengan menyelami dan mengatasi berbagai bentuk hambatan yang dialami oleh para pelaku bisnis dengan aset dan omzet yang kecil.

Bagi UMK, intervensi pemerintah sebagai perwujudan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat, juga sangat diperlukan mengingat bahwa ada banyak faktor yang sangat tergantung kepada tindakan pemerintah. Sebuah penelitian di daerah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha itu sebenarnya dapat dikendalikan melalui peran pemerintah.

Tabel 2.2
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan UMK

Internal	Eksternal
1. Modal	Ketersediaan bahan baku
2. Tenaga kerja	Kondisi ekonomi
3. Teknologi	Keamanan
4. Inovasi	Fasilitas Ekonomi
5. Pemasaran	Sarana dan Prasarana

Sumber : Wahyudi Kumorotomo (Muhandiri 2006)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bukan hanya faktor modal saja yang dibutuhkan untuk memajukan UMK di kalangan masyarakat. Dilihat dari segi Internal bahwa perlunya tenaga kerja yang berkompeten, adanya teknologi yang mendukung, inovasi produk, serta pemasaran yang dilakukan melalui pasar ataupun jejaring lainnya. Namun, jika dilihat dari segi eksternal terdapat ketersediaan bahan baku yang nantinya digunakan untuk memproduksi produk, kondisi ekonomi, keamanan, fasilitas ekonomi yang tersedia, serta sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung dalam distribusi produk.

2.1.2 Modal

Modal merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya suatu produksi. Dalam arti kelangkaannya bahkan peranan faktor modal lebih menonjol lagi. Pengertian modal dalam hal ini bukanlah satu kiasan. Menurut Mubyarto (1994) modal

mempunyai arti yaitu barang apapun yang digunakan untuk memenuhi atau mencapai suatu tujuan.

Soekartawi (2001)mengelompokkan modal menjadi 2 golongan, yaitu :

- Barang yang tidak habis dalam sekali produksi . Misalnya, peralatan yang digunakan dalam berproduksi, yang dihitung biaya perawatannya dan penyusutan selama 1 tahun.
- Barang yang langsung habis dalam proses produksi.

Secara matematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$Q = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n) \dots \dots \dots 2.1$$

Dimana

Q : tingkat produksi (output) dipengaruhi oleh factor X.

X : berbagai input yang digunakan atau variabel yang mempengaruhi Q

Para ekonomi juga menggunakan istilah modal untuk semua alat bantu yang digunakan dalam bidang produksi. Ada kalanya modal dinamakan barang-barang investasi dan modal demikian terdiri dari (Winardi, 1995) :

- Mesin-mesin
- Peralatan
- Bangunan\fasilitas transportasi
- Persediaan barang-barang setengah jadi.

2.1.3 Fungsi Produksi

Produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang sama sekali berbeda, baik pengertian apa, dan dimana komoditi-komoditi tersebut dialokasikan, maupun dalam pengertian apa apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen dengan komoditi itu (Millers dan Meiners, 2003).

Fungsi produksi adalah hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Tujuan dari kegiatan produksi adalah memaksimalkan jumlah output dengan sejumlah input tertentu. Lebih lanjut fungsi produksi dijelaskan oleh Nicholson (2002), fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan matematik antara input yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu . Fungsi produksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini (Nicholson, 2002) :

$$Q = f(K, L, M) \dots\dots\dots 2.2$$

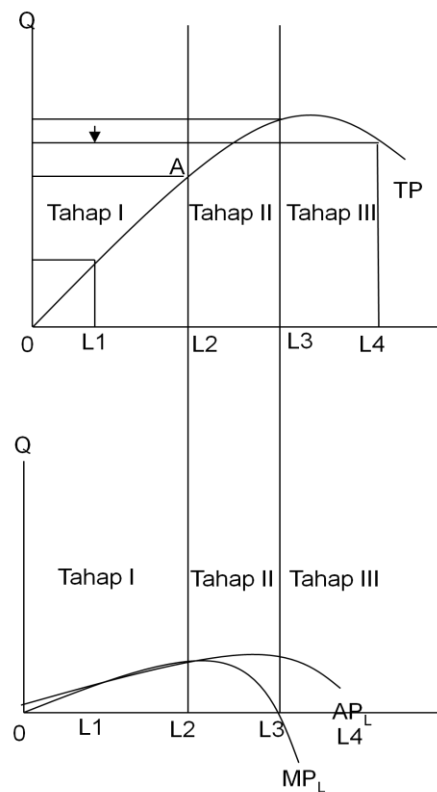
Dimana Q adalah output barang-barang tertentu selama satu periode, K adalah input modal yang digunakan selama periode tersebut, L adalah input tenaga kerja dalam satuan jam , M adalah input bahan mentah yang digunakan.

Menurut Boediono (2002), dalam terori ekonomi diambil satu asumsi dasar mengenai sifat dan fungsi produksi . Fungsi produksi dari semua produksi dimana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hokum yang disebut *the law of diminishing of return*. Hukum ini mengatakan apabila satu macam input ditambah penggunaannya sedangkan input yang lainnya tetap maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input tadi yang ditambahkan tadi mula-mula

mengalami kenaikan, tapi kemudian seterusnya akan menurun jika input tersebut dengan terus-menerus ditambah.

Fungsi produksi ini membatasi pencapaian profit maksimum karena keterbatasan teknologi dan pasar dimana hal ini akan mempengaruhi ongkos produksi, output yang dihasilkan dan juga harga jual output (Iswardono, 2004). Hubungan antara input dengan input, input dengan output, dan output dengan output merupakan karakteristik dari fungsi produksi yang digunakan. Pada umumnya, semakin maju teknologi yang digunakan akan semakin meningkatkan output yang dapat diproduksi dengan suatu jumlah input tertentu.

Gambar 2.1
Kurva Produksi, Produksi Marginal, dan Produksi Rata-rata



Sumber: Miller and Meiners, 2000

- Tahap I menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi, produksi rata-rata dan produksi marginal.
- Tahap II Produksi total terus meningkat sampai produksi optimum sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol.
- Tahap III Penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi, dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif.

Menurut Sukirno (2004), pola produksi seperti Gambar 2.1 diatas disebut kondisi “*Law of Diminishing return*”. Law of diminishing returns adalah hukum yang mengatakan bahwa bila ada tambahan penggunaan dalam satu input, sedangkan penggunaan input lain tetap maka tambahan output (*Marginal Physical Product/ MPP*) yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi, mula-mula kan menaik tetapi tambahan seterusnya menurun bila input tersebut terus ditambah. Hukum ini juga disebut Law of Diminishing Marginal Phisycal Product. (Boediono, 2002).

Hukum hasil marjinal yang terus berkurang (*Law Of Diminishing Marginal Returns*) berlaku apabila (Miller dan Meiners, 2000):

- Hanya ada satu input variabel yang dapat diubah-ubah, baik dikurangi atau ditambah. Sedangkan input lainnya adalah tetap.
- Proses produksi tetap, artinya tidak ada perubahan teknologi.
- Koefisien-koefisien produksi bersifat variabel, artinya kita tidak melibatkan fungsi proporsi baku.

2.1.4 Omzet Penjualan

Kata Omzet berarti jumlah, sedang penjualan berarti kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba/pendapatan. Jadi omzet penjualan berarti Jumlah penghasilan/laba yang diperoleh dari hasil menjual barang/jasa. Menurut Sunaryo (2001) tentang pengertian penjualan: "Penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang ditawarkan. Menurut Siska Oktaviani (2008) Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

Menurut Sutamto (1997) tentang pengertian penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omzet penjualan dari hari kehari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dar tahun ke tahun. Hal ini diperlukan kemampuan dalam mengelola modal terutama modal kerja agar kegiatan operasional perusahaan dapat terjamin kelangsungannya. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu

meningkatkan omzet penjualan dari hari kehari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Dalam praktek, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: (Swastha dan Irawan, 1990).

1) Kondisi dan Kemampuan Penjual

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat menyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni:

- Jenis dan karakteristik barang yang di tawarkan.
- Harga produk.
- Syarat penjualan seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah penjualan, garansi dan sebagainya.

2) Kondisi Pasar

Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu di perhatikan adalah:

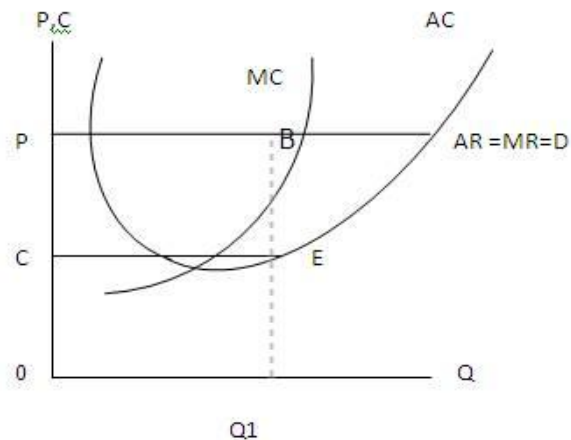
- Jenis pasarnya
- Kelompok pembeli atau segmen pasarnya
- Daya beli

2.1.5 Keuntungan

Keuntungan / Laba didefinisikan dengan pandangan yang berbeda-beda. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut (Arifinal, 1998). Menurut Abdurachman (1993) yang dimaksud dengan keuntungan adalah “perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu.” Definisi lain atas pengertian keuntungan dikemukakan oleh Sunaryo (2001) dimana keuntungan didefinisikan sebagai “kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha pada suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemilik.”

Menurut Pindyck (1999) keuntungan merupakan selisih antara total penghasilan / *revenue* dan total biaya / *cost* atau sebagai perbedaan antara total biaya (TC) dan total penerimaan (TR), sehingga dapat ditulis : $P = TR - TC$. Dalam jangka pendek, syarat laba maksimal pasar persaingan sempurna $P = MC$ yang secara grafis ditentukan oleh bidang segiempat yang terletak antara harga (P) dengan biaya rata-rata total (AC).

Gambar 2.2
Kurva Keuntungan Maksimum



Sumber : Pindyk, 1999

Chariri dan Ghozali (2003) menyebutkan bahwa keuntungan memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut :

- Keuntungan didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi
- Keuntungan didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
- Keuntungan didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan
- Keuntungan memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu
- Keuntungan didasarkan pada prinsip penandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan yang ada.

2.1.6 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia

2.1.6.1 Pengertian dan Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMK pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (BI , 2010).

Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI Unit) merupakan salah satu dari unit kerja Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melayani kegiatan usaha perbankan pada segmen mikro. Secara struktural BRI Unit berada di level paling bawah dalam struktur organisasi BRI. Unit kerja yang berada di atas BRI Unit secara berturut-turut adalah Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat. Formasi standar pekerja di BRI Unit cukup sederhana, yaitu terdiri dari empat fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah Kepala Unit, Mantri, *Teller* dan *Deskman* yang harus ditangani minimal oleh empat orang pekerja, yang merupakan jumlah standar pekerja di BRI Unit.

Berdasarkan data dari Bank rakyat Indonesia realisasi KUR Per tanggal pemuktahiran data tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp.16.133,4 milyar untuk

2.236.926 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,21 juta. Sedangkan realisasi KUR per 30 September 2009 sebesar Rp. 16.256,1 milyar untuk 2.283.766 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,12 juta. Realisasi kredit menurun sebesar Rp. 122,7 milyar (0,75 %) dan debitur menurun sebanyak 46.840 (2,05 %) dan rata-rata kredit naik sebesar Rp 0,09 juta (1,32 %).

KUR yang disalurkan melalui BRI sebagai salah satu bank pelaksana yang merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang khusus diperuntukan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di bidang usaha mikro, kecil dan menengah, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian UMK dan koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit atau pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. KUR baru dilaksanakan oleh BRI pada bulan Maret 2008, dan saat ini hanya dilaksanakan oleh BRI Unit. KUR terbagi menjadi dua yaitu KUR Retail dan KUR Mikro. KUR Retail maksimum *plafond* adalah sebesar Rp.500 juta, sedangkan untuk KUR Mikro maksimum *plafond* adalah sebesar lima juta rupiah. Saat ini BRI hanya mengeluarkan KUR dengan maksimum *plafond* sebesar lima juta rupiah yang hanya dilakukan oleh BRI Unit, sedangkan KUR retail belum dilakukan oleh BRI.

Setelah dana direalisasikan oleh pihak bank, pihak peminjam berkewajiban mengembalikan kredit berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Jangka waktu kredit terbagi tiga, yaitu :

- Kredit jangka pendek, berjangka waktu satu tahun.
- Kredit jangka menengah, berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

BRI Unit memberikan jangka waktu untuk pengembalian kredit berdasarkan jenis pinjaman , yaitu :

- Pinjaman untuk modal kerja (KMK), jangka waktu pengembaliannya adalah dua tahun.
- Pinjaman untuk investasi (KI), jangka waktu pengembaliannya adalah tiga tahun.

Dalam pemberian kredit, pihak peminjam diharuskan memberikan agunan (jaminan) kepada pihak bank. Barang yang menjadi agunan biasanya adalah surat-surat berharga seperti sertifikat rumah atau sertifikat tanah, sedangkan untuk Kretap agunannya adalah SK kerja. Khusus untuk KUR pihak peminjam tidak perlu memberikan agunan karena KUR merupakan kredit atau pinjaman tanpa agunan dan dijamin oleh pemerintah. Dalam KUR pihak peminjam dikenakan bunga pinjaman dalam pengembalian kredit, yaitu sebesar 1,125 persen per bulan. Pemerintah menjamin kredit apabila ternyata kredit yang disalurkan macet melalui perusahaan asuransi BUMN, yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Sarana

Pembinaan Usaha (SPU). Kedua perusahaan itu menanggung kredit macet hingga 70 persen dari total kredit, hal itu terjadi karena KUR dijamin pemerintah.

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009.

Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR menurut Peraturan Menteri Keuangan no 10/PMK 05/2009 adalah sebagai berikut :

1. UMK yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan:
 - merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah
2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
3. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMK yang bersangkutan.
 - KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :

- a. Untuk kredit sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tingkat bunga kredit/margin biaya efektif yang dikenakan maksimal adalah setara dengan 24% (dua puluh empat persen) efektif setahun.
- b. Untuk kredit diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tingkat bunga kredit / margin setara dengan 16% (enam belas persen) efektif per tahun.

Selain itu,terdapat beberapa kendala KUR di dalam penyalurannya. Beberapa kendala dalam penyaluran KUR menurut Peraturan Menteri Keuangan No 10/PMK/05/ 2010 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persepsi yang keliru di masyarakat bahwa KUR merupakan kredit yang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, bahkan banyak yang berpendapat bahwa KUR merupakan bantuan dari pemerintah. Dalam kenyataannya KUR merupakan kredit yang sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank. Karena persepsi yang keliru tersebut, banyak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sampai dengan lunas sehingga menimbulkan kredit macet yang cukup tinggi.
- b. Banyak masyarakat menganggap bahwa penyaluran KUR tanpa agunan selalu sebesar Rp 5.000.000,00. Padahal penyaluran KUR harus disesuaikan dengan kemampuan usaha agar debitur tidak terbebani dalam membayar angsuran.
- c. Sesuai dalam ketentuan dalam pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 10 tahun 2009, KUR hanya bisa diberikan calon debitur yang belum pernah mendapatkan kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan

melalui SID. Dalam kenyataannya banyak perbankan sehingga tidak bisa lagi dibiayai dengan fasilitas KUR.

- d. Banyak calon debitur yang tidak dapat memenuhi persyaratan dari bank seperti identitas diri yang lengkap maupun kondisi usaha yang belum layak untuk mendapatkan kredit.
- e. Untuk beberapa bank, penyaluran KUR terkendala karena keterbatasan bank untuk menjangkau lokasi calon debitur yang relative jauh sehingga penyebaran KUR masih belum merata dan terfokus di kota besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruangan yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat dalam tabel 2.3 :

2.3 Penelitian Terdahulu

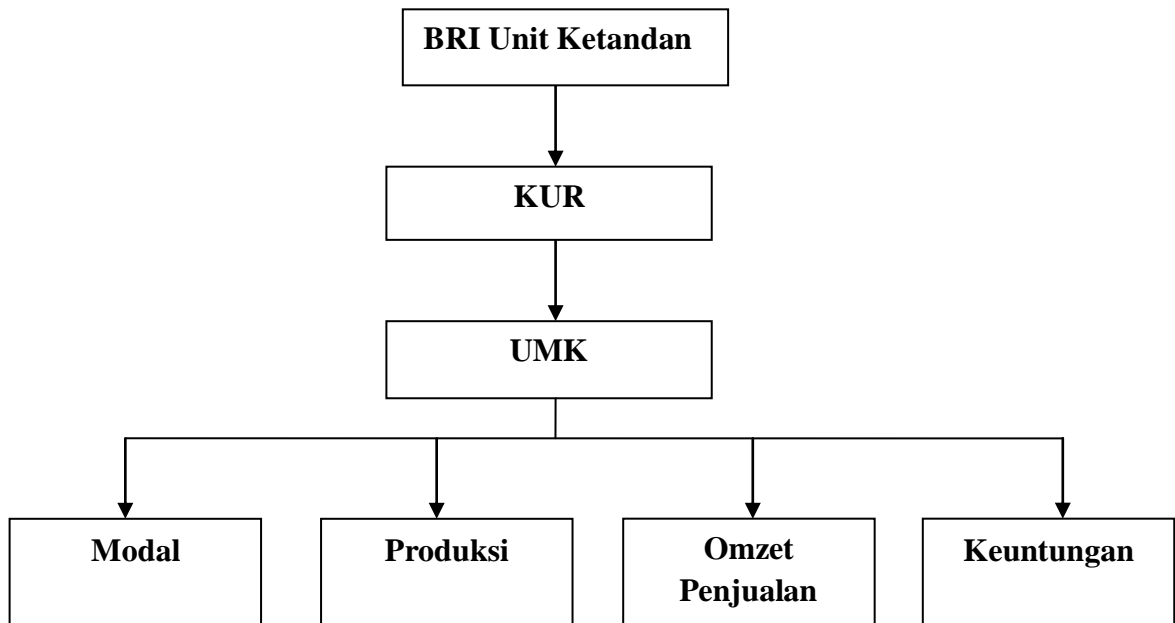
No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Piet Budiono, 2005	Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui kredit Mikro (Studi kasus Koperasi Bagor	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan bermakna secara statistik meningkatkan

		Semarang),	kesejahteraan keluarga, meningkatkan keuntungan usaha, dan meningkatkan kemandirian Perempuan Pedagang Pasar tradisional
2.	Priyo Harsono, 2010	.Analisis Bantuan Kredit Dari Dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Pati Terhadap Perkembangan UMK Binaan Kub rukun Mina Barokah Di Kecamatan Juwana	Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa program kredit yang diberikan dinas Kelautan kabupaten Juwana berpengaruh terhadap kenaikan modal, produksi, omzet penjualan, tenaga kerja dan laba yang diperoleh.
3.	Ari Alfarizi, 2008	Analisis Dampak Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) DPUDT Terhadap Kemandirian Industri Rumah Tangga	Berdasarkan hasil penelitian dampak MISYKAT terhadap industri rumah tangga (usaha mikro), menunjukkan bahwa variabel yang diteliti seperti: pendapatan usaha, keuntungan usaha, jumlah simpanan, dan kemandirian memiliki pengaruh nyata dengan adanya program MISYKAT.
4.	Isra Fenny Simangunsong, 2008	Dampak Pinjaman Dana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa program pinjaman dana bergulir P2KP berpengaruh positif terhadap pendapatan anggota KSM di kelurahan Peleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

5.	Hening Yustika Pritariani, 2009	Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Binaan BKM Arta Kawula di kecamatan Semarang Barat Kota Semarang	Hasil penelitian adalah ada perbedaan modal, teknologi, mutu, total penjualan, jumlah pembeli sebelum dan sesudah adanya binaan dari BKM Arta Kawula, sedangkan keuntungan tidak memiliki perbedaan bahkan mengalami penurunan sebelum dan sesudah adanya binaan dari BKM Arta Kawula.
6.	Indah Yuliana, 2010	Analisis Usaha Monel yang Mendapat Kredit dari Dinas UMKM Kota Jepara	Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa program kredit yang diberikan dinas UMKM kota Jepara berpengaruh terhadap kenaikan modal, produksi, omzet penjualan, tenaga kerja dan laba yang diperoleh.
7.	Fitra Ananda, 2010	Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Mendapat Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang	Hasil penelitian adalah ada perbedaan modal, omzet penjualan dan keuntungan setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT At Taqwa Halhamera di kota Semarang.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dari kredit UMK Bank Rakyat Indonesia Unit Ketandan. Lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 2.1 .



Dari kerangka pemikiran diatas terlihat bahwa dengan adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI Unit Ketandan kepada para pengusaha Mikro dan Kecil yang menjadi nasabah BRI Unit Ketandan dan ditinjau dari perbedaan variabel modal, produksi, omzet penjualan, dan keuntungan usaha mikro sebelum dan sesudah kredit dari BRI Unit Ketandan Kabupaten Klaten.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan dan kajian terhadap penelitian dahulu yang relevan, maka hipotesis yang akan diujikan kebenaran secara empiris adalah :

1. Terdapat perbedaan pada modal usaha mikro sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari Bank Rakyat Indonesia kabupaten Klaten
2. Terdapat perbedaan pada produksi usaha mikro di Klaten sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari Bank rakyat Indonesia unit Ketandan
3. Terdapat perbedaan omzet penjualan usaha mikro sebelum dan sesudah mendapatkan kredit usaha rakyat dari Bank Rakyat Indonesia unit Ketandan
4. Terdapat perbedaan pada keuntungan usaha mikro sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari Bank Rakyat Indonesia unit Ketandan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasioanl Variabel.

Menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Definisi variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Modal Usaha

Merupakan kemampuan finansial Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam menjalankan operasional usahanya, atau untuk memproduksi barang dan atau jasa. Satuan untuk mengukur modal usaha berdasarkan nominal uang dalam rupiah (Djoko Retnadi, 2008).

2. Produksi

Produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang sama sekali berbeda, baik pengertian apa, dan dimana komoditi-komoditi tersebut dialokasikan, maupun dalam pengertian apa apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen dengan komodoti itu (Millers dan Meiners, 2000).

3. Omzet Penjualan

Menurut Siska Oktaviani (2008) Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung

berdasarkan jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan yang dilakukan.

4. Keuntungan

Keuntungan dapat diketahui dengan cara menghitung total penjualan dikurangi total biaya produksi. Satuan untuk mengukur keuntungan tersebut ditetapkan dalam bentuk nominal rupiah dalam setiap bulannya (Djoko Retnadi, 2008). Menurut Pindyck (1999) keuntungan merupakan selisih antara total penghasilan / *revenue* dan total biaya / *cost* atau $\pi = TR - TC$.

3.2 Populasi Penelitian dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro dan kecil yang memperoleh pinjaman KUR dari BRI Unit Ketandan. Dipilihnya BRI Unit Ketandan ini karena banyak usaha mikro dan kecil yang telah berhasil menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat banyak dan terdapat sentra usaha yang berada di wilayah BRI Unit Ketandan yang meminjam KUR untuk kemajuan usahanya. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Sampling*, dimana sampel diambil secara acak (Sutrisno Hadi, 1993). Menurut Sutrisno Hadi, dalam menentukan besarnya sampel tidak ada ketentuan yang mutlak (dalam hal ini berapa %). Pengambilan sampel penelitian ini diambil secara *random* dengan menggunakan *Simple Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dimana

setiap unit dalam sampel mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai unit sampel.

Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2002) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2+1}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = banyaknya nasabah peminjam KUR BRI Unit Ketandan

d = Presentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan sampel yang masih dapat ditoleransi.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah usaha mikro dan kecil yang melakukan pinjaman modal melalui KUR BRI Unit Ketandan, dimana jumlah seluruh nasabah berjumlah 560 nasabah . Pemilihan sampel ini dipilih secara *simple random sampling* dengan karakteristiknya sebagai berikut:

- Tidak menjadikan semua nasabah sebagai sampel melainkan pemilihannya dilihat dari pelaku UMK yang tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran.
- Dipilihnya BRI Unit Ketandan ini dengan pertimbangan banyak UMK yang telah berhasil mengembangkan usahanya melalui pinjaman modal KUR yang direalisasikan oleh BRI Unit Ketandan.

- Yang menjadi nasabah peminjam KUR adalah mereka yang membutuhkan modal untuk usaha dan pengembangan usaha yang dijadikan sebagai sample.

Perhitungan sampelnya dengan $d = 10\%$ adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

$$n = \frac{560}{560 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{560}{6,6}$$

$$n = 85 \text{ sampel}$$

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan studi kasus di BRI Unit Ketandan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendukung penelitian diperlukan data yang aktual. Berdasarkan sumbernya, data-data yang diperoleh dibedakan menjadi :

1) Data Primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada pengusaha mikro dan kecil di kecamatan Ngawen yang melakukan pinjaman KUR kepada BRI Unit Ketandan. Kuesioner atau daftar pertanyaan yang diajukan disusun berdasarkan variabel yang diteliti dengan

menyediakan jawaban alternatif yang dipilih oleh responden sesuai dengan kondisi riil atas persepsi, pendapat dan opini tersebut, sehingga diharapkan didapat data yang akurat atas penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data ini dapat diperoleh dari dokumen dan laporan tahunan yang diperlukan dalam penelitian ini diBRI Unit Ketandan, sumber literatur, internet, dokumentasi dan data pendukung lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data pada prinsipnya berfungsi mengungkapkan variable yang akan diteliti. Data mempunyai sifat memberikan gambaran tentang suatu masalah atau persoalan. Data primer yang langsung dikumpulkan di lapangan berupa;

- i. Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat secara sistematis (Hasan, 2002). Wawancara dilakukan secara berstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.
- ii. Kuesioner sebagai jumlah pertanyaan tertulis guna untuk mengumpulkan informasi dari responden (Masri Singarimbun, 2011).

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diolah (Sofyan Efendi, 2011).

Dalam analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian serta Uji Statistik Pangkat Tanda Wilcoxon.

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

- Uji Validitas

Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana penempatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengertian valid tidaknya alat ukur tergantung kemampuan alat tersebut untuk mengukur objek yang diukur dengan cermat dan tepat (Suliyanto, 2005).

Suatu kuesioner dikatakan valid jika memiliki muatan faktor lebih besar dari 0,32 (muatan faktor $> 0,32$) dan memiliki *pearson correlation* kurang dari 0,05 (*person correlation* $< 0,05$). Berikut criteria kevalidan suatu kuesioner berdasarkan nilai KMO (*Kaiser Mayer Olkin*);

- 1) KMO mendekati 1,00 = sangat baik
- 2) KMO mendekati 0,80 = baik
- 3) KMO mendekati 0,70 = cukup baik
- 4) KMO mendekati 0,60 = sedang

5) KMO mendekati 0,50 = buruk

- Uji Reliabilitas

Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan hasil yang relative sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki mtingkat reliabilitas yang tinggi (Suliyanto, 2005).

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara,yaitu;

- 1) *Repeated measure/* pengukuran berulang. Disini pengukuran dilakukan berulang-ulang pada waktu yang berbeda,dengan kuesioner yang sama atau pertanyaan yang sama.
- 2) *One shot.* Pada tehnik ini pengukuran dilakukan pada satu waktu,kemudian dilakukan perbandingan dengan pertanyaan yang lain/dengan pengukuran korelasi antar jawaban. Pada program spss,metode ini dilakukan dengan metode *cronbach alpha* ,dimana suatu kuesioner dikatakan reliabel jika *cronbach alpha* lebih dari sama dengan 0,60 .

B. Uji Statistik Pangkat Tanda Wilcoxon.

Menurut Suprpto (2001), uji statistik pangkat tanda wilcoxon termasuk jenis statistik non parametik,dipakai apabila peneliti tidak mengetahui karakteristik kelompok item yang dipakai sumber sampelnya. Metode ini dapat diterapkan terhadap data yang diukur secara ordinal dan dalam kasus tertentu,dengan skala

nominal. Pengujian non parametik bermanfaat untuk digunakan apabila sampelnya kecil dan lebih mudah dihitung daripada metode parametik. Dalam statistik non parametik, kesimpulan dapat ditarik tanpa memperhatikan bentuk distribusi populasi (statistik yang bebas distribusi).

Uji pangkat *Wicolxon* digunakan sebagai uji beda dengan alasan data yang diteliti berasal dari sejumlah responden yang sama dan berkaitan dengan periode waktu pengamatan yang berbeda sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman KUR dari BRI Unit Ketandan.

Dengan uji ini, dijelaskan apakah penelitian yang dilakukan mengalami perubahan saat variabel ini diamati pada awal periode maupun pada akhir periode. Adapun variabel-variabel yang diamati dan diuji adalah pendapatan, modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan dalam UMK. Setelah uji tanda *Wilcoxon* dilakukan akan muncul nilai Z dan nilai probabilitas (p). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- H_0 = Tidak ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman KUR dari BRI Unit Ketandan.
- H_1 = Ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman dari BRI Unit Ketandan.

Jika probabilitas (p) > 0,05 H_0 diterima, jika probabilitas (p) < 0,05 maka H_1 diterima. Signifikansi penelitian ini akan membandingkan Z tabel dan Z hitung. Menurut Agoes Soehanie (2008) test statistik bagi rata-rata adalah nilai Z dari rata-

rata, karena $\alpha=5\%$ maka nilai kritis yang bersesuaian dari tabel adalah $Z_{0.025} = 1.96$ dan $-Z_{0.025}$ (test 2 ekor). Daerah kritis adalah $Z > 1.96$ atau $Z < -1.96$.